

## ABSTRAK

Studi ini tentang Upaya Pemkot Surabaya dalam pengelolaan objek wisata Kenjeran. Selain itu juga untuk mengetahui posisi dan sikap Pengusaha penginapan di Kenjeran dengan Pemkot dalam tarik-menarik kepentingan pada ijin Pariwisata Hotel tersebut. Masing-masing pihak berusaha untuk mempertahankan kepentingan politik, sosial dan ekonomi atas keberadaan Hotel tersebut.

Studi ini mengkaji tentang faktor apa yang menyebabkan konflik antar Pemerintah Kota Surabaya dengan Pengusaha Penginapan di Kenjeran serta bagaimana Pemerintah Kota Surabaya menanggapi hambatan dalam proses pengelolaan wisata Kenjeran Surabaya. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang kaya akan informasi melalui penggalan data untuk menghasilkan deskripsi data yang lengkap. Studi dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kontraksi rencana Pemkot dalam mengatur tata kelola wisata yang ada di Kenjeran, yakni Pantai Kenjeran yang terbagi menjadi 2 tempat wisata yaitu Pantai Kenjeran baru dan Pantai Kenjeran lama. Saat ini Pemkot sedang gencar-gencarnya berbenah pada Pantai Kenjeran lama yakni dengan membangun destinasi wisata baru pada kejeran yaitu Jembatan Suroboyo dan Air Mancur menari yang di gadang-gadangkan sebagai icon kota Surabaya, di satu sisi Pantai Kenjeran baru yang dikelola oleh swasta (PT. Granting Jaya) tidak ada kebijakan dari Pemkot untuk melakukan revitalisasi. Justru Pemkot melakukan tarik ulur penyegelan terhadap motel-motel di sekitar Kenjeran yang jelas-jelas telah di pakai sebagai tempat berasusila oleh para pengunjung dan itu telah melanggar perda nomor 23 tahun 2012.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hubungan Negara, Pasar dan Masyarakat. Teori Hubungan Negara, Pasar dan Masyarakat menjelaskan bahwa pemkot sebagai aktor Negara dan Swasta sebagai aktor Pengusaha, yaitu pengelola Motel Kenjeran telah masuk dalam satu sistem dengan masyarakat lokal dimana usaha itu berdiri. Sehingga jika dianalisis menggunakan teori yang dinyatakan Gramsci mampu menciptakan hubungan dan konflik. Yakni hubungan yang tercipta antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Hubungan ini terbentuk karena masyarakat, pengusaha, dan pemerintah membentuk suatu struktur sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan, dalam struktur sosial pasti ada dominasi, dimana dominasi ini ditentukan oleh kekuasaan memberikan kebijakan kepada pihak yang tidak memiliki kekuasaan.

Hasil dalam studi ini menunjukkan bahwa Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memberlakukan perintah dan larangannya pada pengusaha. Kebijakan Pemerintah tidak selalu selaras dengan keinginan pengusaha, terkadang dalam proses perijinan selalu terdapat kendala. Ini bertentangan dengan rencana pemkot untuk menata wisata Kenjeran. Pengusaha mengontrol Pemerintah yang menyebabkan Pemkot menjadi lemah. Ini sebagai bukti melemahnya Negara atas pengusaha.

*Kata Kunci: Tata Kelola Wisata, Hubungan , Negara, Pasar, Pemkot, Pengusaha.*